

## **PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN SDM DALAM MENGELOLA POTENSI LOKAL PERDESAAN**

Oleh  
**Mardi Murachman<sup>1</sup>, Eva Kurnia Farhan<sup>2</sup>**  
<sup>1</sup>[mardimurahman@gmail.com](mailto:mardimurahman@gmail.com), <sup>2</sup>[evakiki21@yahoo.com](mailto:evakiki21@yahoo.com)  
<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas

### **Abstrack**

*The purpose of the study was to determine the managerial quality aspects of the village apparatus in creating good village governance, in synergy with the government by examining its contribution through indicators of community participation, cross-sectoral coordination, accountability and transparency, and the responsibility of village officials through sub-aspects of strengthening vision in optimizing the potential of funds. and superior village resources so that they have the carrying capacity of human resource management in tackling poverty and improving the welfare of rural communities independently both economically and socially in rural areas. The research method used in this descriptive study was analyzed qualitatively, data collection by purposive sampling method, through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive analysis model. The results of the study show that the human resource management sector at the leadership level and the degree of participation of village residents has not been able to simultaneously become an innovator in efforts to overcome village difficulties which systemically affect the acceleration of the growth of village sub-economics as a support for community welfare. The intensity of the approach of the relevant agencies is needed in encouraging the acceleration of the management of village organizational change and the mentality of Human Resources through improving programs and coordinating external and internal villages.*

*Keywords: Poverty alleviation, Resource Empowerment, Rural Local Potential.*

### **Abstraksi**

Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek kualitas manajerial aparatur desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, secara *sinergitas* pemerintah dengan menelaah kontribusinya melalui indikator Partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektoral, akuntabilitas dan transparansi, serta tanggungjawab aparatur desa melalui sub aspek penguatan visi dalam mengoptimalkan potensi dana dan sumberdaya unggulan desa sehingga memiliki daya dukung manajemen sumberdaya manusia dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan di pedesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan sektor manajemen sumberdaya manusia pada level kepemimpinan (*leading Sector*) dan derajat Partisipasi warga desa belum secara simultan dapat menjadi inovator dalam upaya penanggulangan kesulitan desa yang secara sistemik berpengaruh bagi percepatan pertumbuhan sub-sub perekonomian desa sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Perlu intensitas pendekatan instansi terkait dalam mendorong akselerasi manajemen perubahan organisasi desa serta mentalitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan program program dan koordinasi eksternal maupun internal desa.

**Kata kunci : Penanggulangan kemiskinan, Pemberdayaan sumberdaya, Potensi Lokal Perdesaan.**

## Pendahuluan.

Kemiskinan yang terjadi dapat di akibatkan karena kebijakan yang tidak berpihak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap yang diperintah (warga Negeranya), tentu saja ini akan menjadi pekerja rumah besar bagi *stake holder* dan pemangku kebijakan di Indonesia dalam membuat serta merencanakan/merancang kebijakan lebih mendekati kepada asas berkeadilan. Keadilan sosial sebagai *the difference principle*, adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling Kurang Beruntung (John Rawl. 2012). Disisi lain keadilan sosial juga sebagai *the principle of fair equality of opportunity*, yang menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka ini yang harus diberi perlindungan khusus.

Sebagaimana ditegaskan pemerintah pada agenda prioritas pembangunan 2015-2019 (*Nawacita*) yang didalamnya termasuk juga kegiatan meningkatkan kualitas hidup melalui kualitas sumber daya manusianya:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi, sistem penegakan hukum, yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis, ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter Bangsa,

9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kabupaten Musi Rawas yang maju, sejahtera dan religius dengan tagline Musi Rawas Sempurna merupakan akronim dari sejahtera mandiri.

Dari beberapa contoh kemiskinan yang terjadi kriteria kemiskinan dapat disebabkan karena beberapa hal seperti kemiskinan konjungtural dan kultural. Konsep ekualitas dalam demokrasi yang diterapkan pada dasarnya merupakan konsep yang utuh artinya tidak boleh persamaan ditekankan disalahsatu bidang kehidupan saja. Sementara bidang lainnya ditinggalkan, secara demikian ekualitas hukum dan ekualitas politik hanya menjadi lengkap bila disertai dengan ekualitas ekonomi.

Demokrasi hanya mempunyai makna bila di suatu Negara terdapat pembagian pendapatan yang cukup adil. Kesenjangan yang mencolok antara lapisan kaya dan lapisan miskin mengisyaratkan bahwa kehidupan demokrasi yang dimaknakan partisipasi peran aktif belum berjalan dengan baik. Tampaknya distribusi pendapatan yang adil merupakan prinsip demokrasi yang tidak dapat diabaikan. Kepedulian melalui kehidupan demokratis merupakan kontrol rakyat dengan pemerintahannya, melalui inovasi ide gagasan dan pendapat. Bila rakyat sudah tidak boleh bicara sesuai dengan keyakinannya maka sudah tidak ada lagi demokrasi. Pemerintah tidak akan pernah mengetahui titik-titik kelemahannya karena tidak ada lagi koreksi dari rakyatnya. Apa yang dinamakan sebagai partisipasi sosial kontrol dan tanggung jawab sosial hanya dapat baik bila dalam suatu masyarakat ada kontribusi pemerintah.

Negara berkembang, termasuk Indonesia, distribusi penghasilan Nasional terlihat masih senjang sehingga *jargon* keadilan dan pemerataan selalu terdengar lantang diucapkan oleh mereka yang benar-benar mendambakan keadilan dan pemerataan maupun mereka yang menjadikan kedua istilah itu sebagai *Lip service* atau konsumsi publik saja. Orang

sering keliru menganggap bahwa keadilan ekonomi akan dapat tercapai apabila kepada setiap Warga Negara diberikan persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), yang dilupakan disini adalah perbedaan-perbedaan antara kesamaan kesempatan *de jure* dengan persamaan kesempatan *de facto*.

Dengan mengendalikan kesamaan kesempatan *de jure* seseorang dengan latar belakang sosial dan ekonomi lemah sampai kapanpun tidak akan dapat berkompetisi bebas dengan orang yang latar belakang sosial dan ekonomi kuat. Jadi yang diperlukan adakah persamaan kesempatan *de facto*. Untuk ini pemerintah bertugas melakukan perombakan peraturan-peraturan agar mereka yang tergolong lemah dapat berdaya. Bahkan jika perlu melakukan perombakan yang bersifat ekonomi struktural. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan yang pada Pilkada serentak tahun 2015 telah menetapkan H. Hendra Gunawan sebagai Bupati terpilih dan Hj. Suwarti sebagai Wakil Bupati terpilih yang secara resmi dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) visi pembangunan Nasional adalah 2005-2025 ditetapkan visi Kabupaten Musi Rawas, “Kabupaten yang maju, sejahtera dan religius” dengan tagline MUSI RAWAS SEMPURNA”, yang merupakan akronim dari : sejahtera mandiri produktif, unggul, religius, nyaman dan aman. Untuk mencapai

visi tersebut Kabupate Musi Rawas tahun 2016-2021mencanangkan misinya:

1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah.
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari.
4. Mewujudkan *good governance*.
5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius.

Dalam rangka melaksanakan misi yang kedua yaitu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, Kabupaten Musi Rawas yang berpenduduk 404.587 jiwa menempati luas wilayah 6.357.09 km<sup>2</sup> tersebar pada 14 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 186 Desa; diantaranya masih ada yang berstatus sebagai desa tertinggal (ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019).

Menurut Bupati Musi Rawas H.Hendra Gunawan,hingga saat ini terdapat 38 desa tertinggal .7desa sangat tertinggal dan yang sebagian besar merupakan desa pemekaran dekat kawasan hutan. (antarasumsel.com 31 Mei 2016.10.04,wib diakses tgl 22 september 2017).

Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas dalam paparannya pada rapat bersama BPMPD Kabupaten Musi Rawas yang berjudul evaluasi pembangunan desa pada tanggal 3 Maret 2016, antara lain mengemukakan 16 Desa yang memiliki IPD kurang dari 50,00 yang terdapat pada 7 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Desa tertinggal perkecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016.

No	Kecamatan	Total desa	Jumlah Desa Tertinggal	%
1	STL Ulu	12	3	25.00
2	Selangit	11	3	27.27
3	BTs Ulu	18	5	27.78
4	Ma. Lakitan	19	3	15.79
5	Ma Beliti	11	1	9.09
6	Megang sakti	19	1	5.26
Jumlah			16	

Sumber : diolah dari Data BPS Kabupten Musi Rawas.

Tabel 2. Desa dengan IPD terendah (Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Rawas tahun 2014).

Kecamatan	Desa	IPD 2014	Index perdimensi					
			Pelayan an dasar	Kond isi infra strukt ur	Aksesibil itas transport asi	Pelayan an publik	Penyelen ggaraan pemerint ahan	
1	Muara lakitan	Mukti karya	32.43	8.44	60.35	61.76	40.44	60.35
2	selangit	Napal melintang	42.55	31.59	51.56	79.18	49.65	60.35
3	BTS ULU	Gn.kembang baru	42.97	29.50	56.70	66.66	62.23	51.56
4	BTS ULU	Mekar jaya	43.78	29.50	25.58	65.19	62.23	56.70
5	Stl ulu	Sukaraya baru	44.41	31.06	60.35	77.78	49.65	25.58
6	Bts ulu	Lubuk pauh	45.40	29.78	48.13	89.49	56.10	60.35
7	Bts Ulu	Sadu	45.78	40,03	51.56	77.47	49.65	48.13
8	Bts Ulu	Gn Kembang lama	46.52	37.21	51.78	66.66	49.65	51.56
9	Muara Lakitan	Sindang laya	46.70	47.54	67.43	61.76	41,97	51.78
10	Muara Lakitan	Semangus	46.74	32.07	37.13	78.91	54.56	67.43
11	Megang sakti	Muara Megang 1	47.13	45.97	74.05	64.95	62.23	37.13
12	Selangit	Taba Tengah	47.15	40.61	56.70	63.52	62.23	74.05
13	STL Ulu	Paduraksa	47.82	37.18	64.00	64.95	49.65	56.70
14	Selangit	Taba Remanik	47.83	40.61	41.29	73.25	49.65	64.00
15	Muara Beliti	Bumi agung	48.72	51.33	56.70	65.26	43.20	41.29
16	Stl Ulu	Sukaraya	48.90	42.69	38.10	60.91	62.23	56.70

Tabel 3. Pendapatan Penduduk Desa mulyosari,kec Megangsakti

No	Kategori	Rata-Rata Pendapatan
1.	Sejahtera 1	12.883.334
2.	Pra Sejahtera	9.135.000
3.	Miskin	1.567.320

Sumber : Olah data observasi STL Ulu Terawas 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk pendapatan penduduk miskin di Desa Mulyosari sebesar Rp. 1.498.056 per bulan jauh berada di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Musi Rawas Rp. 2.507.400 per bulan, atau bisa disimpulkan penduduk miskin di Desa Pasenan memiliki pendapatan yang lebih Rendah 60 persen dari UMK Kabupaten Musi Rawas. Dari temuan di lokasi penelitian ini diketahui bahwa kemiskinan ini dikarenakan rendahnya harga karet dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, sehingga pendapatan yang diterima penduduk Desa turun dan berada dibawah UMK Kabupaten, sementara itu untuk penduduk pra sejahtera mereka tidak hanya

bergantung dari karet melainkan juga sumber pendapatan dari sektor usaha lainnya seperti warung, kolam, bengkel dan PNS ataupun mereka memiliki luasan lahan yang lebih dari 2 Ha.

Dari temuan Observasi di lapangan dampak turunnya harga karet dan kenaikan harganya yang tidak pasti, banyak warga mengalihkan lahan karet mereka ke perkebunan sawit dengan harapan sawit harganya lebih stabil dibanding harga karet. Keadaan ini membawa kepada pengeluaran ongkos pengolahan lahan yang mahal kurang lebih 2,5 juta dalam satu hektarnya.pengeluaran biaya petanipun menjadi bertambah dalam kondisi perekonomian warga desa yang belum begitu baik.

### ***Tinjauan Kepustakaan.***

#### ***Pemberdayaan masyarakat***

Dalam menjawab isue *good governance*, diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang akomodatif terhadap nilai-nilai *good governance* Strategi pengembangan dan pemberdayaan Sumber daya manusia merupakan unsur utama yang dapat mendukung pemerintahan yang *good governance* (Hiskia M, Ambar TS,2011 h:47). Pengembangan SDM ditujukan untuk pengembangan kemampuan pembelajaran yang kontinyu, karena dinamisasi perubahan lingkungan semakin menuntut kemampuan intelektual (*brain intensive*) untuk menghasilkan pengetahuan (handoko 1996.:8). Lingkungan internal organisasi dalam hal ini pemerintahan desa, dapat berupa internal dan eksternal. Lingkungan internal seperti budaya kerja, etos kerja, kebiasaan-kebiasaan pegawai, perilaku organisasi, intensitas pertemuan, sistem diskresi dan lain-lain. Kesemua itu terus berubah dan berkembang sehingga menuntut sebuah pembelajaran yang sesuai agar permasalahan yang muncul dapat diantisipasi. ( Ambar teguh, h.:48).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan ***pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan masyarakat*** dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa secara koordinatif untuk pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa memiliki arti yang sangat penting. dimana sinergitas, sinkronisasi jaringan kerja serta pemberdayaan sumberdaya baik secara kualitas maupun kapasitas menjadi perhatian serius disamping transparansi dan

akuntabilitas penyelenggara pemerintah desa dan pembangunan desa.

Potensi Desa yang dapat membantu perekonomian penduduk Desa paska pemekaran desa lebih dominan kepada sektor pertanian, perkebunan, Dengan kondisi ini potensi SDM desa dalam sektor agribisnis. desa Trisakti lebih memiliki banyak peluang pengembangannya. Penguatan sektor pendukung seperti akses jalan desa menuju kota terdekat memerlukan penanganan yang lebih serius

. Kondisi peran fasilitasi dan dinamisasi dari manajemen desa sebagai penggerak program belum dapat sepenuhnya dirasakan geliatnya dalam menghadirkan kantung- kantung atau lahan baru bagi warga desa untuk menghasilkan pendapatan sampingan diluar mata pencaharian pokok mereka. ini mengakibatkan semakin keruhnya kreasi dan inovasi produk- produk usaha menengah kecil desa yang belum maksimal dikembangkan.

Edwin. B. Hippo, (1981:16), *Personnal management is the planning, organizing directing and controlling of the procurement, development competation integration, maintenance, and separation of human resources to the and that individual organizational and societal objectives are accomplished*". (Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat).

Legge (Amstrong 2009:4) mengemukakan bahwa "kebijakan SDM harus diintegrasikan antara perencanaan strategis, bisnis dan digunakan untuk memperkuat suatu budaya yang sesuai (atau mengubah budaya) dalam organisasi bahkan SDM merupakan sumberdaya yang berharga dan sumber unggulan kompetitif. SDM mungkin paling efektif

dikembangkan dan didorong oleh kebijakan yang konsisten yang mendorong munculnya komitmen. Akibatnya kemauan karyawan akan berkembang untuk bertindak lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan kepentingan organisasi untuk meraih keunggulan.

Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhard dan Wright, (2008 :4) Manajemen SDM adalah kebijakan praktik, dan sistem, yang mempengaruhi kebiasaan, sikap dan performa seseorang karyawan. Menurut Suparno, (2015:) Lingkup kegiatan MSDM sesuai dengan pengelompokan fungsinya mencakup kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

Dalam Fungsi Perencanaan (*Planning*) merupakan fungsi penetapan program-program pengelolaan SDM yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi, Keegiatannya meliputi pemahaman tujuan, sasaran organisasi, analisis pekerjaan, perencanaan untuk pemenuhan serta pengendalian .Dalam fungsi pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas yang harus dikerjakan dan tanggung jawab. (*maintaining*). Dalam fungsi pengarahan (*Directing/energizing*) merupakan fungsi pemberian dorongan pada para anggota agar dapat dan mampu berkinerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan .

Pemberdayaan sumberdaya masyarakat desa.

Dari Beberapa temuan di Desa Megangsakti, kemiskinan salah satunya diperparah oleh turunnya harga hasil bumi sehingga mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat dan keadaan bahwa rata-rata yang memiliki lahan luas adalah bukan penduduk setempat tetapi penduduk diluar Mulyosari dan Tri Sakti banyak tidak memiliki lahan luas. Banyak lahan tidur

yang kurang produktif. Kepemilikan lebih banyak dijual oleh warga setempat kepada Warga Di luar desa. Pada Tabel dibawah ini ditampampilkkan rerata pendapatan responden desa Mulyosari:

**Tabel 4. Pendapatan Penduduk Desa Mulyosari**

No	Kategori	Rata-Rata Pendapatan
1.	Sejahtera I	11.107.500
2.	Pra Sejahtera	5.720.000
3.	Miskin	1.550.000

Sumber : olah Data Mulyosari STL Ulu Terawas 2017

Menurut catatan dari keterangan warga setempat, apabila musim kering atau kemarau, ketika sungai Megang dan surut, ada kebiasaan yang merusak yaitu menyetryum yang kebanyakan pelaku serta pemasok modal operasionalnya berasal dari luar Desa setempat, biasanya dilakukan pada malam hari untuk menghindari aparat. Jumlah mereka banyak terkadang sampai 7-10 orang dengan berkendaraan motor atau mobil. Dampak dari perilaku merusak ini mengakibatkan populasi ikan menjadi berkurang dan dalam jangka panjang berdampak merusak ekosistem sungai.

Sampai saat ini upaya pemerintah sebagai leading sector, untuk mengatasi ketidakseimbangan pendapatan tampaknya belum berhasil baik. Faktor-faktor ekonomis seperti Bias Investasi, bias kualitas, bias harga dan terutama Bias Birokrasi telah menjadikan peran pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Bahkan menjadi "Terlalu mahal" bagi kebanyakan golongan miskin-('Silent Majority") yang notabeneanya sebagai sasaran dimana pelayanan yang responsif bermuara, akses pelayanan publik dalam bentuk kemudahan investasi misalnya, itu lebih bias kepada golongan menengah keatas yang bermukim di kota sehingga subsidi pemerintah untuk pelayanan publikpun lebih menguntungkan golongan mereka, padahal golongan miskinlah (*pheriperial*) yang sepatasnya mendapat pertolongan.

## Pembahasan

Pembangunan manusia (*human development*) merupakan suatu proses memperbesar pilihan- pilihan penduduk mulai dari hidup sehat, panjang usia, terdidik serta memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Sebagai pilihan tambahan adalah kemerdekaan politik dan kehormatan pribadi (Surapaty 2016). Pembangunan berwawasan kependudukan (*people centered development*) mengandung pemahaman penduduk sebagai subyek (pelaku), dan obyek (penikmat) pembangunan. Disini penduduk diposisikan sebagai titik sentral pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Selain memberikan stressing pada teori-teori normatif, salah satu ciri pokok administrasi negara baru yang membedakannya dari administrasi negara konvensional adalah: komitmen yang mendasar *pada keadilan sosial* yang mengacu kepada kehendak kesejahteraan dan kemakmuran (*prosperity*). Dilandasi oleh pandangan keadilan sosial ini, Administrasi Negara baru mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang: Preferensi Nilai Bentuk Organisasi dan Manajemen, misalnya : perlunya pemerataan dalam pelayanan yang diberikan pemerintah, rasa tanggap yang lebih baik (*responsive*) terhadap kebutuhan warga Negara. *Government Seek Public Interest* (Denhart) melebihi kebutuhan birokrasi dan administrator, perubahan dalam manajemen pemerintahan serta rasa tanggungjawab yang lebih besar (Akuntabel) di kalangan Administrator Pemerintah.

Seperti data pendukung baik dalam berupa angka maupun data sekunder deskriptif yang sangat penting untuk mengetahui pertumbuhan serta perubahan sosial, termasuk angka kemiskinan yang terjadi dimasyarakat khususnya Desa. Belum tersedia di Kantor Desa.

**Masalah keadilan sosial dan pemerataan pelayanan publik** menjadi isu yang sangat relevan pada 2–3 dekade ini, dibanyak Negara dunia termasuk Negara yang sedang berkembang (*Under-developed countries*), karena makin besarnya peranan yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya Nasional. Khususnya di Indonesia sejak mulainya pemerintah reformasi, peranan Birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik telah berkembang dengan sangat pesat dengan indikator pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur: perumahan dan perhubungan meningkat, seperti halnya banyak di Negara lain pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik (PLN) dan Air Minum (PAM) di selenggarakan oleh Negara melalui birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga Negara.

Karena itu akses kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi amat penting dalam pencapaian pemerataan pelayanan administrasi. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah alam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat didalam masyarakat, khususnya di Desa.

Melalui parameter terhadap kedua akses ini menunjukkan bahwa berbeda dengan “Retorika Politik” yang sering kita dengar, cukup banyak kebijaksanaan

pelayanan publik di Indonesia (seperti di Negara ketiga lainnya) lebih cenderung memihak kepentingan politik seperti : *Birokrasi yang stagnan serta klientel tertentu daripada membela kepentingan golongan miskin yang tidak atau kurang memiliki sumber-sumber politik dan ekonomi, pelayanan publik cenderung lebih menguntungkan golongan menengah – baca “Elit pengusaha dan teknokrat dan golongan “atas” yang tinggal di kota, karena adanya “Bias Ekonomi Sosial dan Birokratis terhadap golongan tersebut”*. Karena itu tidak mengherankan bila di dalam penelitian sering terungkap bahwa Akses sebagian besar warga Negara terhadap Birokrasi pemerintah serta pelayanan yang mereka terima dari organisasi pemerintah belum sebaik yang diharapkan oleh masyarakat.

Adalah tidak berlebihan memberikan pemikiran dengan mengkaji masalah kemiskinan tersebut dari sudut pandang *Akses SDM masyarakat desa dihadapkan dengan kesempatan untuk beradaptasi dengan cepat dilingkungan alam pekerjaannya melalui badan-badan usaha desa yang dibina oleh pemerintah dan dikembangkan oleh warga desa secara mandiri, seperti : pelatihan dan pendidikan serta pendampingan. Dengan menggunakan ukuran Akses, dapat dikemukakan bahwa selama reformasi dimulai tahun 1998 pemerataan dimensi sosial belum tercapai dalam sektor-sektor tersebut dengan ditengarai oleh kemiskinan desa.*

Selain itu juga, hambatan-hambatan riil birokrasi terhadap akses kepada pelayanan publik terus berjalan, bahwa ketimpangan pelayanan terjadi karena birokrasi pemerintah masih dikuasai oleh pemikiran laten tentang Akses Diferensial,

maka perlulah kiranya perlu model pemikiran untuk pengelolaan kemiskinan yang berwawasan pemerataan.

Di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka mendapatkan akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan usaha kreatif masyarakat. Namun oleh karena permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk memikirkannya, maka timbullah situasi “Kekurangan”, sehingga diperlukan adanya “Penjajahan”, dalam keadaan seperti ini mereka yang mempunyai kekuatan *ekonomi dan politik* akan cenderung untuk lebih dulu dilayani, sedangkan golongan bawah akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Untuk meningkatkan penggunaan fasilitas yang telah didirikan dan untuk “Mendongkrak kelas bawah”,

Usaha-usaha pemerintah ini telah mulai berhasil mengurangi ketimpangan geografis dalam penyebaran fasilitas pendidikan rendah di desa. Namun, akses investasi perkebunan sawit dan adanya beberapa PT Yang berdiri di desa di lingkungan Kabupaten Musi Rawas dinikmati oleh golongan sosial ekonomi yang berbeda, yaitu lebih banyak kepada golongan masyarakat kaya di kota dibanding masyarakat desa setempat yang relatif berpendapatan rendah, masih terlalu bias ke penduduk kota dan lebih menguntungkan golongan menengah keatas pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Pengamatan yang didapat dari determinasi kemiskinan , sampai pada suatu kesimpulan umum bahwa, *setiap kebijakan pemerintah yang kurang menitik beratkan*

*kepada “ transfer sumber-sumber secara merata akan cenderung untuk makin meningkatkan ketimpangan sosial, ekonomi dalam masyarakat*

### **Birokrasi Pemerintah dan Akses Terhadap Pelayanan Publik**

Studi-studi teoritis dan empiris yang telah diadakan oleh : Blan, Gauldner, Etzioni, Koas, Mont Gomery, Riggs, dan Elsen Stadt, sudah sangat memperluas Horizon pemahaman tentang organisasi birokratik. Proses birokrasi serta peranan birokrasi dalam pembangunan dan modernisasi, semua subsidi ini memperlihatkan bahwa birokrasi modern yang sangat menekankan rasionalitas, dan efisiensi adalah sarana yang paling berguna untuk organisasi dan administrasi di masyarakat modern.

Dilain pihak, terasa ada “Kekosongan” dalam studi tentang dampak birokrasi terhadap stratifikasi sosial dan terhadap keadilan sosial, baru ketika Dwigth Waldo dalam suatu Konferensi di Universitas Syracuse mentasbihkan perspektif Minow Brook (1986) dalam pemikiran administrasi Negara yang menyatakan secara eksplisit bahwa masalah keadilan sosial dan pemerataan harus merupakan fokus dalam studi disiplin ilmu ini. yang terjadi dalam perhatiannya terhadap masalah pemerataan ini para ahli sosiologi organisasi bahkan sudah lebih maju dari para ahli administrasi (seperti studi yang dilakukan oleh Sjoberg, Brymer dan Faris, Levin dan Tanbe, Hunt dan lain-lain). Roach dan Rein menyimpulkan bahwa : Organisasi Birokratik *kurang mampu* dan karena itu kurang cocok untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi oleh masyarakat miskin. (Gideon Sjoberg, Ricard. A Brymer dan Bufford Farris “Bureucracy and The Lower Class” : 1966).

*Thus*, bahwa birokrasi bahkan “Cenderung” mempertahankan ketimpangan yang terdapat dalam stratifikasi sosial yang ada dengan asumsi dasar dan juga terbukti pada akhirnya : bahwa untuk mempertahankan dirinya dan kliennya birokrasi cenderung menghindari masyarakat miskin karena golongan tersebut kurang menguntungkan bagi keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan organisasi, karena alasan inilah banyak birokrasi pemerintah cenderung menghindari kelompok miskin yang rawan karena evaluasi terhadap kemampuan dan keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuannya sangat ditekankan pada aspek kuantitatif.

Karena pertimbangan Efisiensi dan rasionalitas yang sangat mendominasi pencapaian tujuan-tujuan organisasi ini birokrasi pemerintah cenderung untuk “memilih” anggota atau kelompok masyarakat yang paling menjamin tercapainya keberhasilan organisasi. Dengan kata lain kelompok masyarakat miskin yang paling perlu dibantu dan yang paling perlu mendapatkan manfaat dari pelayanan birokrasi pemerintah akhirnya dijauhi dan karena itu kedudukan mereka yang lemah dalam masyarakat menjadi semakin lemah, sampai pada kesimpulan, bahwa keresahan para pengajar paradigma administrasi Negara baru (Neo Publik Administration) patut mendapat perhatian serius dari para teoritis dan praktisi pemerintah di Indonesia, karena birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan (*Welfare State*) masyarakatnya ternyata cenderung mendiskriminasi kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan lebih banyak dari mereka.

### **Kerangka Konseptual Untuk Menelaah Akses Terhadap kemiskinan .**

Dalam teori maupun dalam praktek selalu di asumsikan bahwa proses alokasi sumber-sumber dan pelayanan publik dapat diberikan secara lebih baik bila diadakan modernisasi dalam organisasi pemerintah. Dengan kata lain pendekatan yang ada lebih menekankan pada peranan mekanisme penyalur layanan publik tanpa memperhatikan hubungan antara *akses* dan *struktur sosial* atau lingkungan organisasi. Dan pendekatan ini jelas punya keterbatasan, karena punya asumsi bahwa semua anggota masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan yang terbatas itu, serta mempunyai pengetahuan (*Rasionalitas*) yang sama tentang pelayanan yang disediakan. Salah satu pendekatan yang lebih baik untuk memahami masalah pemerataan Akses terhadap pelayanan untuk publik menuju pengentasan kemiskinan adalah pendekatan konseptual yang ditawarkan oleh Hasan (*Riaz Hasan, Socio Economic Constraints on Access to Public Services*) yang menunjukkan bahwa masalah akses harus dipahami didalam konteks yang lebih menyeluruh (holistik) dan mencakup tiga dimensi, yaitu:

1. Nilai (Kognitif).
2. Perilaku (Behavioral) dan
3. Birokratik Administratif.

Struktur sosial mempengaruhi ketiga dimensi ini, oleh karena itu untuk mengkaji akses terhadap pelayanan publik, maupun

setiap upaya untuk memperbaiki Akses terhadap pelayanan tadi harus mampu mengembangkan kerangka konseptual maupun strategi yang dapat mencakup ketiga dimensi tersebut.

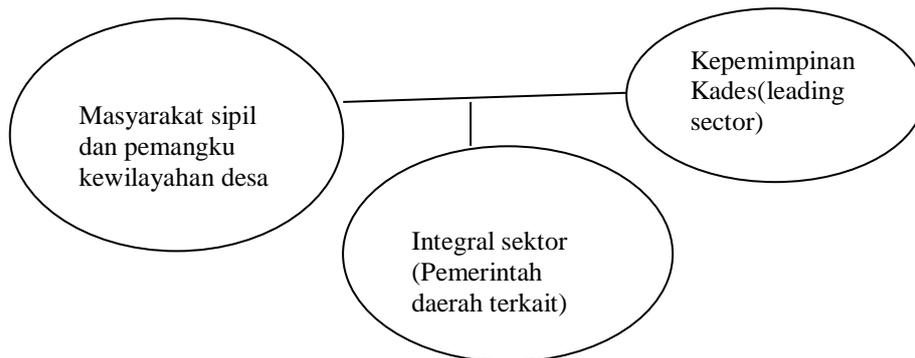
- Dimensi perilaku, mencakup :
  - ❖ Kemampuan berkomunikasi masyarakat desa
  - ❖ Dinamika interaksi sosial masyarakat desa
  - ❖ Pola perilaku klien.
- **Dimensi Kognitif**
  - ❖ Kesadaran tentang masalah.
  - ❖ Kesadaran tentang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah.
  - ❖ Pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia.
  - ❖ Pengetahuan tentang dimana dan bagaimana cara mendapatkan sumber daya.
  - ❖ Perasaan percaya diri dalam mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
- Dimensi Birokratik – administratif antara lain mencakup :
  - ❖ Kekakuan prosedur.
  - ❖ Pemerataan perlakuan.
  - ❖ Jarak sosial antara customer (masyarakat *klien*) dan petugas.
  - ❖ Tersedianya saluran untuk menyampaikan perasaan tidak puas.
  - ❖ Latar belakang serta pandangan petugas dan
  - ❖ Kebijakan kepegawaian.

Gerakan reformasi total baru saja terjadi yang telah melahirkan pergeseran paradigma (Model) penyelenggara pemerintah yaitu *From Government to Governance* atau dari *Rule Government* menjadi *Good Governance*, paradigma rule

government menekankan pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang hanya bertumpu kepada peraturan-peraturan semata-mata sementara itu penyelenggaraan pemerintahan dalam paradigma *Good Governance*, tak hanya bersandar pada peraturan dan pemerintah atau Negara (state), tapi juga perlu melibatkan seluruh elemen yang ada, baik

yang berada di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah.

Element tersebut meliputi sektor (*masyarakat sipil*) dan masyarakat sipil (civil society), disini dapat terlihat adanya interaksi antara ketiga faktor tersebut dalam proses pembuatan pelaksanaan kebijakan sebagaimana terdapat dalam gambar :



Gerakan reformasi total ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan juga telah mengubah corak sistem pemerintahan yakni dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik, mengarah kepada pemerintahan yang desentralistik.

Pada sisi lain, saat ini kondisi masyarakat yang telah mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis harus didukung oleh realitas *de facto* dengan adanya Lembaga pemberdayaan usaha-usaha warga masyarakat desa melalui inovasi pengembangan BUMDES. Sehingga tingkat kehidupan masyarakat semakin baik sebagai indikasi telah terjadi "*Empowering*" pada diri masyarakat. Pada kondisi demikian, masyarakat semakin sadar terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara bangsa yang merujuk kepada pendapat Huntington sebagai bagian dari *Nation State*

(Huntington), dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani mengajukan tuntutan, keinginan, kepentingan aspirasinya tidak saja kepada pemerintah, tetapi juga kepada wakilnya yaitu badan permusyawaratan desa (BPD),

Masyarakat tak terkecuali di desa, semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan, baik oleh pemerintahnya maupun para wakilnya.

Menghadapi dinamika masyarakat tersebut, disamping harus membangun kompetensi dirinya, aparatur pemerintah harus mau dan mampu mengubah posisi dan peran (Revitalisasi mereka dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah, berubah menjadi suka melayani, dari yang semula menggunakan pendekatan kekuasaan

berubah menjadi suka menolong menuju kearah yang fleksibel (tidak arogan) kolaboritas dan dialogis serta dari cara yang “Sloganis” menjadi atau menuju cara kerja yang realistis pragmatis.

Selain itu aparatur pemerintah, terutama sekali yang menduduki jabatan pimpinan di tuntutan profesionalisme dan inovatif mereka dalam menjalankan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh rakyat. Profesionalisme ini lebih diarahkan *pada sikap dan perilaku* para aparatur pemerintah baik daerah maupun desa yang benar-benar mau dan mampu bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dan kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada masyarakat.

Mereka harus memiliki kompetensi, bersikap demokratis responsive dan adaptif dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya terutama dalam menyikapi perubahan lingkungan, tuntutan, aspirasi dan kepentingan yang senantiasa mengalami tumbuh kembang di masyarakat.

Aparatur pemerintah Daerah merupakan bagian dari agen Manajemen perubahan, diharapkan terus berdaya upaya meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) pelayanan publik (Publik Service) harus di utamakan karena hakekat di bentuknya pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti apa yang dikemukakan oleh Rasyid (1998:139)

bahwa “Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, ia tidaklah di adakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Peran strategis aparatur pemerintah dapat mengekskalasi iklim pemberdayaan SDM desa melalui peningkatan kinerja dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan segala sikap, perilaku tindakan dan kebijakan yang telah sedang dan akan mereka lakukan pada publik. Akuntabilitas (*Accountability*) mereka harus disampaikan secara terbuka (*Openness*) dan transparan (*Transparency*) kepada publik, seperti yang di anjurkan oleh Hughes (1992:240) bahwa “***Government Organization are created by the publik, for the publik and need to be accountable to it***”. Organisasi pemerintah dibentuk oleh publik dan untuk publik sehingga harus bertanggung jawab kepada publik.

### **Kesimpulan**

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang terus mengalami tumbuh kembang di era reformasi ini maka pemerintah desa secara manajerial masih belum maksimal dalam mengedepankan pelayanan publik yang ) semakin responsif terhadap masalah atau isu kemiskinan di desa. beberapa pemicunya adalah perubahan serta pertumbuhan pola pikir dan mental mental gerakan inovasi dengan etos kerja yang belum maksimal dalam implementasi di level Sumberdaya manusia desa . sehingga dengan demikian para aparatur pemerintah

desa dipandang perlu terus berusaha menjadi dinamisator bagi warga masyarakat yang ada di desa yang harus ditingkatkan kompetensi diri mereka dalam menghadapi dan mengantisipasi tantangan ini, kompetensi para pemimpin organisasi publik setidaknya mencakup meningkatkan kemampuan, baik berupa pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*Capability*), keterampilan (*skill*), keahlian (*expertise*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya yang diamanatkan kepadanya.

Peran baru (*new role*) pemimpin meliputi peran sebagai perancang (*disigner*), sebagai guru (*teacher*) dan sebagai pendorong, pengayom dan sekaligus pelayanan (*steward*) sebagai perancang (*designer*), seorang pemimpin harus mampu merancang atau merumuskan apa yang menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, nilai-nilai organisasi dan memberi peluang kepada orang-orang yang ada dalam organisasi untuk berperan serta. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu merumuskan apa yang menjadi kebijakan, strategi dan struktur pelaksanaan kegiatan Keterampilan baru (*new skill*) seorang pemimpin di masa depan meliputi visi bersama (*shared vision*) membangun visi bersama (*building shared vision*) memunculkan mental-mental integralistik, meningkatkan diri kedalam dan berpikir sistemik (*engaging in system thinking*).

Disamping harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan otonomi daerah dan Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good governance*) juga harus mampu memenuhi harapan, tuntutan dan aspirasi masyarakat miskin yang dilayani, serta mampu

memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Bihaming, Hariawan 2019, Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Yogyakarta, Deepublish
- Denzi, Norman, Lincoln Yvonna S, 2011, Qualitative Reseach, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Eko Widodo, Suparno, 2015 Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro, 2019, Memuliakan Desa. Yogyakarta APMD Press
- Jeremias, Keban J. 2008 Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Issue, Yogyakarta, Gava Media
- Pramusinto Agus, Agus P. Erwan, 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan Publik. Yogyakarta Gava Media. Hal 251)
- Qodir Zuly, 2017, Sosiologi Pemerintahan. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Robin, Stephen. P. 2015 Perilaku Organisasi, Jakarta Salemba empat
- Sulistiani, Ambar Teguh, 2011. Memahami Good Governance, Dalam perpektif Sumberdaya Manusia. Yogyakarta, Gava Media
- Suwatno dan Priansa. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutrisno, Budi, 2009, Filsafat Kebudayaan, *Confucius*, Yogyakarta, Kepel Press
- Surapaty, Surya Chandra, 2016, *Melaksanakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Program Genre*,

- Sedarmayanti, 2012 *Good Governance*,  
kepemerintahan yang baik & *Good  
Corporate Governance*, Bandung  
Mandar Maju.
- Syafei Inu Kencana, 2019, *Filsafat  
Pemerintahan*, Yogyakarta. Pustaka  
Pelajar
- Sinambela. LP. 2019. *Manajemen Sumber  
Daya Manusia*.Jkarta Bumi Aksara
- Thoha Miftah 2010. *Ilmu Administrasi  
Publik Kontemporer*. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group.
- Wasistiono .Sadu. 2007. *Prospek  
Pengembangan Desa*. Bandung  
Fokus Media.
- Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014  
Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang undang Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Desa
- Perda Kabupaten Musi Rawas No.6 Tahun  
2016 tentang RPJMD,2016 Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2016-2021